

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu wilayah yang rawan terhadap berbagai jenis bencana, termasuk bencana alam. Bencana alam merupakan fenomena alam yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan dan kehancuran lingkungan yang pada akhirnya dapat menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan pembangunan yang telah dibangun selama ini. Bencana alam yang terjadi akibat eksploitasi sumberdaya alam tanah, hutan, dan air secara berlebihan serta akibat perubahan cuaca atau iklim global telah mengakibatkan bertambahnya lahan kritis, sehingga dapat mengakibatkan banjir, kekeringan, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan serta meningkatnya laju erosi dan sedimentasi. Salah satu fenomena alam yang menimbulkan kerugian besar yang selalu mengancam beberapa wilayah di Indonesia adalah bencana banjir dan longsor. Banjir dan longsor merupakan suatu fenomena alam biasa, namun akan menjadi suatu yang sangat merugikan jika mengancam keberadaan hidup manusia¹.

¹ Handayani Riny. *Analisis partisipasi masyarakat dan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan manajemen bencana di kabupaten serang provinsi banten*. Fisip Universitas Sultan Agung Tirtayasa (2011)

Kabupaten Bantul adalah salah satu wilayah rawan terhadap ancaman bencana, bencana yang terbesar adalah bencana gempa bumi tahun 2006 berpusat di Kabupaten Bantul, dan semua Kecamatan dari total 17 Kecamatan merasakan guncangan bahkan terasa sampai di Provinsi Jawa Tengah, Jumlah korban keseluruhan dari Wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah mencapai 5.743 orang meninggal dan sejumlah 38.423 orang luka-luka (data 12 Juni 2005, jam 18.00 WIB). Akibat dari adanya gempa tersebut sejumlah 126.932 keluarga kehilangan rumah tinggalnya, 183.399 keluarga rumahnya rusak berat, dan 259.816 keluarga rumahnya rusak ringan (data tanggal 12 Juni 2005, jam 18.00, Media Center). Berdasarkan dari jumlah data tersebut jumlah pengungsi di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah diperkirakan mencapai 330.331 keluarga.

Selain itu Kabupaten Bantul rawan terhadap bencana Banjir dan longsor, hal ini dikarena Wilayah Kabupaten Bantul membentuk sebuah cekungan atau basin air tanah regional yaitu Sistem Akuifer Merapi hingga Sistem Akuifer Kepesisiran. Sehingga Relief dari daerah ini relatif datar yang terbentuk oleh akibat adanya proses erosi di daerah hinterland dan sedimentasi di dataran aluvial kepeesisiran (*coastal alluvial plain*). Berdasarkan karakteristik wilayah tersebut, maka potensi bencana yang mungkin terjadi adalah bencana banjir. Bencana banjir di Kabupaten Bantul pada umumnya terjadi di sungai-sungai besar, salah satunya Sungai Opak. Sungai ini mudah meluap karena tidak mampu menampung luapan

debit air dari sungai Oyo, Daerah yang sering dibaniri yaitu diKecamatan Kretek, Kabupaten Bantul².

Berdasarkan data Pusdalops BPBD Kabupaten Bantul pada Selasa (28/11/2017), Bencana yang melanda wilayah Bantul disebabkan adanya badai Cempaka yang menghuyur seluruh wilayah DIY. Kabupaten bantul selatan paling banyak terkena dampak bencana, total ada 132 titik kejadian bencana baik longsor, banjir, maupun pohon tumbang. Hingga Selasa malam warga, petugas dan relawan masih bersiaga mengantisipasi keadaan yang memburuk pasca hujan yang mengguyur hampir 24 jam tersebut.

Informasi yang dihimpun sebanyak 27 titik kejadian banjir atau genangan air tersebut tersebar di beberapa desa wilayah Bantul selatan, tengah dan timur. Dampak dari kejadian banjir yang diakibatkan karena saluran air maupun sungai meluap itu adalah jembatan putus, talud atau bangunan penahan abrasi sungai rusak, merendam permukiman dan lahan pertanian tergenang.³ Namun demikian, data dari Pusdalops Bantul itu menyebutkan tidak ada korban jiwa dalam kejadian banjir tersebut, akan tetapi peristiwa tersebut mengakibatkan sebanyak 750 jiwa warga Bantul mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Kecamatan Imogiri, terdapat beberapa kerusakan terparah di Dusun Ndogongan. Dusun ini terletak di sebelah barat di bantaran Sungai Oya

² <https://vienastra.wordpress.com/2011/03/31/bencana-dan-karakteristik-wilayah-yogyakarta/>

³ <https://news.detik.com/jawatengah/3749965/sejumlah-jembatan-jebol-dihantam-banjir-di-bantul>. Diakses jum'at 05 januari 2018. Pukul 10:30 wib

yang berada di dekat Jembatan Siluk. Sumur kemasukan luapan air sungai hingga kotor dan tidak bisa dikonsumsi. Jalan raya Imogiri-Siluk-Panggung dan jalan dusun rusak. Aspal mengelupas dan timbunan lumpur memenuhi halaman rumah warga. Bencana tanah longsor terdapat di beberapa desa di Kecamatan Imogiri, beberapa di antaranya tanah longsor di Dusun Siluk I, Selopamiro Imogiri yang memutus akses jalan penghubung Dusun Siluk I dan Dusun Kajor. Terdapat beberapa rumah hancur karena di terjang longsor, salah satu rumah yang terkena dampak tanah longsor yaitu rumah Mbah Sutomo dihantam longsor dari tebing Mengger yang berada tepat di belakang rumahnya. rumah yang menjadi satu-satunya sebagai tempat untuk dirinya bernaung, ambruk dan rata dengan tanah.

Tabel 1.1

Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2017

| Jumlah Kejadian Menurut Kecamatan dan Jenis Kejadian Tahun 2017 | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Kecamatan | Jenis Kejadian | | | | | | | | | | |
| | Abraasi | Angin Kencang | Bangunan Roboh | Banjir | Erosi | Gempa | Kebakaran | Longsor | Pohon Tumbang | Tanah Amblas | Grand Total |
| Bambanglipuro | | 28 | | 4 | | 27 | 1 | 2 | 4 | | 7 |
| Banguntapan | | | 2 | | 5 | | 12 | | 5 | | 24 |
| Bantul | | | 1 | | | | 15 | | 11 | | 27 |
| Dlingo | | | | | | | 3 | 14 | 1 | 1 | 19 |
| Imogiri | | | 4 | | 7 | | 5 | 13 | 4 | | 33 |
| Jetis | | | | | | | 8 | 2 | 6 | | 16 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|----|---|---|----|----|-----|----|----|---|-----|
| Kasih | | | | | 4 | | 10 | 6 | 10 | | 30 |
| Kretek | 1 | | | | | | 4 | 1 | | | 6 |
| Pajangan | | | 1 | | 2 | | 3 | 5 | 1 | | 12 |
| Pandak | | | | | | | 5 | | 1 | | 6 |
| Piyungan | | | | | 2 | | 10 | 12 | 3 | | 27 |
| Pleret | | | 1 | | 4 | | 9 | 9 | 4 | | 27 |
| Pundong | | | | | | | 6 | 5 | 4 | | 15 |
| Sanden | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| Sedayu | | | | | | | 2 | 4 | | | 6 |
| Sewon | | | | | 3 | | 13 | 1 | 6 | | 23 |
| Srandakan | 1 | | | | | | 1 | 1 | 3 | | 6 |
| Jumlah | 2 | 28 | 9 | 4 | 27 | 27 | 109 | 76 | 64 | 1 | 347 |
| | | | | | | | | | | | |

Sumber data: Pusdalops BPBD Kab. Bantul, 2017

Data diatas menunjukkan masih Banyaknya korban jiwa maupun harta benda dalam peristiwa bencana yang selama ini terjadi di Kabupaten Bantul, dari total bencana selama tahun 2017, Kecamatan Imogiri mengalami jumlah kejadian angka tertinggi, hal ini lebih sering disebabkan karena kurangnya kesadaran dan pemahaman pemerintah maupun masyarakat terhadap potensi kerentanan bencana serta upaya mitigasinya. Dari data tersebut menunjukkan Penanggulangan dalam menangani korban bencana gempa bumi Yogyakarta 26 Mei serta bencana yang terdapat di Kabupaten Bantul belum terintegrasi dan belum melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, sehingga dalam penanggulanganya sistem Mitigasi belum terlaksana dengan baik. Penanggulangan bencana masih sering dianggap sebagai bantuan dan

pertolongan saja yang belum dianggap sebagai program Penanggulangan atau mitigasi yang menyeluruh, dalam pelaksanaannya masih sering bersifat reaktif dan kurang konsepsional. Badan-badan atau instansi serta kekuatan yang mendukung memerlukan penggiatan setelah atau dekat sebelum bencana terjadi untuk dapat secara tepat dan cepat bertindak dalam mengatasi ancaman bencana.

Penanggulangan bencana adalah bagian integral dari pembangunan nasional, pembangunan tersebut merupakan serangkaian kegiatan penanggulangan sebelum terjadinya bencana, pada saat terjadinya bencana maupun sesudah terjadinya bencana. Bencana seringkali hanya ditanggapi secara parsial oleh pemerintah. Bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat saja. (*emergency response*)⁴. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Bantul harus siap siaga untuk menghadapi ancaman bencana yang akan terjadi, kesiapsiagaan bencana menjadi sangat penting jika daerah tersebut telah dipetakan menjadi daerah rawan bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat secara luas. Dalam pengertian ini, setiap individu ikut bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana untuk keamanan dan keselamatan dirinya, keluarga, maupun lingkungannya. Pemerintah Kabupaten Bantul menjadi penanggung jawab pelaksanaan kesiapsiagaan peringatan dan peringatan dini sebagaimana

⁴ Departemen Komunikasi dan Informatika RI. 2007. Jakarta *Penanggulangan Bencana Alam dalam Perspektif Agama di Indonesia*. Departemen Komunikasi dan Informatika RI : Jakarta. Hal 12

dinyatakan dalam Peraturan Daerah Kabupatean Bantul No 01 tahun 2013 tentang Kesiapsiagaan dan Pringatan Dini Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 4, Pemerintah Daerah memberikan layanan kesiapsiagaan dan peringatan dini dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara adil dan merata dengan mempertimbangkan kesetaraan gender dan tingkat kerentanan.⁵

Sesuai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana⁶, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena pemerintahan dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2010 menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Bencana dan dalam mengimplementasikan dan menyelenggarakan peraturan daerah No 05 Tahun 2010 ini adalah BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang telah disebutkan dalam Bab IV Kelembagaan pasal 9.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Pemerintah adalah yang paling bertanggung jawab untuk menangani bencana alam baik sebelum, ketika terjadi dan pasca terjadi bencana. Oleh karena itu pemerintah membentuk Badan yang

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 01 Tahun 2013 *Tentang Kesiapsiagaan Dan Peringatan Dini Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana* Pasal 4

⁶ Undang-undang no 24 tahun 2007 *tentang penanggulangan bencana* Bab III Pasal 5

bertanggung jawab untuk menangani permasalahan tersebut. Kabupaten Bantul adalah Kabupaten yang memiliki potensi bencana alam yang tinggi, oleh karena itu penulis ingin mengetahui: ***“Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam Penanggulangan Bencana Alam”***

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka penulis ingin membatasi agar penelitian ini efisien dan sesuai permasalahan, dalam ranah pelaksanaannya, penulis hanya membahas pelaksanaan tanggap darurat untuk penanggulangan bencana alam bencana banjir dan longsor yang ada di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dalam menanggulangi Tanggap Darurat bencana banjir dan Longsor diKecamatan Imogiri Kabupaten Bantul?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi peran BPBD dalam menanggulangi bencana alam banjir dan longsor di Kecamatan Imogiri?

1.3. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini untuk mengetahui:

1. Mengetahui peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dalam menanggulangi Tanggap Darurat bencana banjir di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul.
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi peran BPBD dalam menanggulangi bencana alam banjir dan longsor di Kecamatan Imogiri.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam pengerjaan penelitian, penulis berharap karya tulis ini dapat mempunyai manfaat bagi pembaca maupun penulis. Manfaat dari karya tulis ini antara lain:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan kedepanya menambah pengetahuan dan memberikan wawasan bagi pembaca pada umumnya dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa khususnya Ilmu Pemerintahan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam upaya

menentukan langkah selanjutnya khususnya dalam hal penanggulangan bencana alam di wilayah Kabupaten Bantul.

1.5. Studi Terdahulu

Pertama *Sistem Informasi Manajemen Komando Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi*, Lindung Siswanto⁷, Universitas Gadjah Mada, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sistem informasi manajemen komando tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi yang dapat membantu Komando dalam penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat bencana. Metode yang digunakan dengan pendekatan kuantitatif, Hasil penelitian ini Saat pembentukan komando tanggap darurat sistem mulai dijalankan dengan melakukan instalasi pada satu komputer. Komando melakukan inisiasi data yang terdapat pada komando tersebut yang meliputi data komando, data relawan, data korban, data donatur dan barang. Khusus untuk data barang sudah terisi data barang yang paling sering digunakan saat terjadi bencana sehingga komando tanggap darurat tidak perlu menginputkan data barang, namun jika barang yang dimaksud belum ada, komando dapat menambahkan data barang pada Data Barang.

Penelitian ke dua *Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Sungai Mandau*

⁷ Siswanto Lindung, *Sistem Informasi Manajemen Komando Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi*, Universitas Gadjah

Tahun 2013. Rina Mariana,⁸ Universitas Riau, Penelitian ini dilakukan penulis di Kabupaten Siak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial Kabupaten Siak dan Kecamatan Sungai Mandau. Menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak telah melaksanakan strategi yang telah dibuat dalam penanggulangan bencana dengan melakukan kerjasama, koordinasi, dan komunikasi antar instansi-instansi yang terkait belum berjalan dengan baik.

Penelitian ketiga yang berjudul *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam Penanggulangan Bencana Alam*, di susun oleh Ilham Ramadhan dan Armansyah matondang⁹, Universitas Medan Area, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BPBD kota medan, Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, Hasil dari penelitian ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan) BPBD) Kota Medan telah menunjukkan tugas dan fungsinya dengan melakukan penyuluhan pada masyarakat, seperti menyediakan sarana prasarana dan memberikan bantuan logistik.

Ke empat penelitian yang berjudul *Peran Pemerintah Kabupaten Karo Dalam Penanggulangan Bencana Alam Erupsi Gunung Sinabung*

⁸ Mariana Rina, *Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Sungai Mandau Tahun 2013*. Fakultas Ilmu sosial dan politik . Universitas Riau. 2015

⁹ Ramadhan Ilham dan matondang Armansyah, *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam Penanggulangan Bencana Alam*. Fisip. Universitas Medan Area. 2016

Kabupaten Karo Sumatera Utara Tahun 2013 – 2015. Renny Febrin¹⁰, Universitas Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Koordinasi lintas sektor beberapa dinas terkait yang masih tidak jelas dalam penanganan pengungsi bencana erupsi Gunung Sinabung, Penanganan yang belum efektif dari pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Sinabung, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, Hasil dari penelitian ini Dalam pengkoordinasian antar instansi pun banyak hal yang menghambat penanggulangan bencana, salah satunya adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Karo. Penghambat utama bagi Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung adalah karena kurang baik nya koordinasi sehingga terjadi “menunggu” perintah dan koordinasi dari BPBD karena Dinas Sosial hanya sebagai pendukung.

Ke lima penelitian yang berjudul *Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir Di Kabupaten Kolaka Utara*. Vidia Reski Awalia dan Andi Nuraeni Aksa¹¹. Universitas Muhammadiyah Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, Peran pemerintah dalam menanggulangi resiko bencana banjir di Desa Tahibua Kecamatan Tiwu Kabupaten Kolaka Utara sudah baik, ini

¹⁰ Febrin renny, *Peran Pemerintah Kabupaten Karo Dalam Penanggulangan Bencana Alam Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Sumatera Utara Tahun 2013 – 2015*. Fakultas Ilmu sosial dan politik. Universitas Riau. 2016

¹¹ Awalia Vidia Reski dan Nuraen Andi, *Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir Di Kabupaten Kolaka Utara*. Fisip. Universitas Muhammadiyah Makassar. 2015

terlihat dalam peranan ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen bencana dengan baik. Sehingga Penanggulangan bencana tersebut dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Ke enam penelitian berjudul, *Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanggulangan Banjir Rob Di Desa Alahair Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2011-2015*. Penelitian yang dilakukan oleh Iin Nurbaity¹². Universitas Riau. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kordinasi pemerintah dengan masyarakat dan faktor penghambat penanggulangan banjir, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian, kordinasi yang dilakukan pemerintah daerah tersebut mencakup, perencanaan, komunikasi, pengarahan, pengendalian. Faktor penghambat penanggulangan banjir rob di Desa Alahair terdiri dari tidak terealisasinya perencanaan dengan baik, tingkat komunikasi yang tidak harmonis, dan minimnya anggaran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ke tujuh penelitian yang berjudul, *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Bantaeng*. Nasyiruddin dan Muhammad Yusuf Badjido¹³. Penelitian ini menggunakan

¹² Nurbaity Iin, *Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanggulangan Banjir Rob Di Desa Alahair Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2011-2015*. Fisip.Universitas Riau. 2018

¹³ Nasyiruddin dan Yusuf Badjido Muhammad Yusuf Badjido, *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Bantaeng*. Universitas Muhammadiyah Makassar. 2015

jenis pendekatan deskriptif Kualitatif, yaitu pengukuran dengan cermat terhadap studi kasus fenomena sosial tertentu dalam penelitian ini membahas strategi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penanggulangan banjir di kabupaten banteng, hasil pembahasan, Strategi penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bantaeng yang telah dilakukan yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana berupa alat dan lahan untuk membangun waduk, sebagai penampung air dari Daerah Aliran Sungai (DAS) dan anak sungai ketika datang terjangan hujan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan salauran air secara profesional sehingga air dapat mengalir ke tempat yang disediakan.

Ke delapan penelitian berjudul, *Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana Di Kota Baubau*. Disusun oleh Anwar Sadat¹⁴, Universitas Muhammadiyah Buton. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana efektifitas kinerja pemerintah dalam penanggulangan bencana pada BPBD kota baubau, dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode deskriptif kualitatif, artinya suatu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum, hasil pembahasan dari penelitian ini yaitu efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau suatu pencapaian hasil yang memumaskan dalam Produktifitas Aparat, Kualitas Layanan korban

¹⁴ Sadat Anwar, *Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana Di Kota Baubau*. Fisip. Universitas Muhammadiyah Buton. 2016

ben-cana banjir, Responsivitas dalam ke-mampuan aparat pada Badan Penang-gulangan Bencana Daerah Kota Baubau untuk mengenali kebutuhan korban bencana.

Ke sembilan penelitian yang berjudul, *Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanggulangan Bencana Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, oleh Lukman M. Fauzi¹⁵, Universitas Jenderal Achmad Yani. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi dan kemudian menganalisis peran yang dijalankan oleh TNI dalam penanggulangan bencana di Provinsi DIY. metode yang di gunakan menggunakan metode kualitatif dengan mengkombinasikan data primer berupa wawancara, observasi lapangan, hasil pembahasan dalam penelitian ini, Peranan dalam Penanggulangan bencana yang terjadi di Provinsi DIY oleh pihak TNI secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik meskipun penulis merasa bahwa upaya tersebut belum dilakukan secara optimal dan komprehensif. Hal ini didasarkan tidak setiap proses penanggulangan bencana TNI berperan besar.

Ke sepuluh, *Analisis Kebijakan Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Rob (Studi Kasus Kota Tegal)*, oleh Soni Hazam, Drs. Edi Santoso, S.U, Drs. Wiwik Widayanti¹⁶. Universitas Diponegoro, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

¹⁵ Fauzi Lukman, *Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanggulangan Bencana Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Fakultas Ilmu sosial dan politik. Universitas Jenderal Achmad Yani. 2014

¹⁶ Hazam Soni, Santoso Edi, Widayanti Wiwik, *Analisis Kebijakan Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Rob (Studi Kasus Kota Tegal)*. Fakultas Ilmu sosial dan politik. Universitas Diponegoro. 2009

bagaimana kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat Kota Tegal dalam penanggulangan Rob. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil dari pembahasan dalam penelitian ini, Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Strategi yang digunakan Pemerintah Kota Tegal dalam penanggulangan rob adalah dengan melibatkan segenap instansi dan elemen terkait masalah rob, yaitu dengan melibatkan SKPD, perangkat daerah, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat dan masyarakat yang terkena dampak rob. Keterlibatan segenap unsur dan elemen masyarakat Kota Tegal tersebut meliputi; tahap perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan evaluasi. Sebelum dilakukan penetapan kebijakan penanggulangan rob, kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang dijadikan sasaran program disosialisasikan.

Tabel 1.2

Tabel Literature Review

| No | Judul Penelitian, Nama Peneliti, Dan Tahun Penelitian | Tujuan penelitian | Metode penelitian | Hasil penelitian |
|-----------|--|--|--|---|
| 1. | Sistem Informasi Manajemen Komando Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi, Lindung Siswanto, Universitas Gadjah Mada, | penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sistem informasi manajemen komando tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi | Metode yang digunakan dengan pendekatan kuantitatif, | Komando melakukan inisiasi data yang terdapat pada komando tersebut yang meliputi data komando, data relawan, data korban, data donatur dan barang. Khusus untuk data barang sudah terisi data barang yang paling sering digunakan saat terjadi bencana sehingga komando tanggap darurat tidak perlu menginputkan data barang, namun jika barang yang dimaksud belum ada, komando dapat menambahkan data barang pada Data Barang. |
| 2. | Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dalam Penanggulangan | Mengetahui Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak | Menggunakan pendekatan kuantitatif dan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak telah melaksanakan |

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| | Bencana Banjir Di Kecamatan Sungai Mandau Tahun 2013. Rina Mariana, Universitas Riau, | Dalam Penanggulangan Bencana Banjir | pengelolaan data dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengamatan | strategi yang telah dibuat dalam penanggulangan bencana dengan melakukan kerjasama, koordinasi, dan komunikasi antar instansi-instansi yang terkait belum berjalan dengan baik. |
| 3. | Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam Penanggulangan Bencana Alam, di susun oleh Ilham Ramadhan dan Armansyah matondang, Universitas Medan Area | Mengetahui peran BPBD kota medan | Penelitian deskriptif, yakni jenis penelitian yang hanya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai keadaan yang didapatkan pada waktu penelitian dilakukan | Penelitian ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan) BPBD) Kota Medan telah menunjukkan tugas dan fungsinya dengan melakukan penyuluhan pada masyarakat, seperti menyediakan sarana prasarana dan memberikan bantuan logistik. |
| 4. | Peran Pemerintah Kabupaten Karo Dalam Penanggulangan Bencana Alam Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Sumatera Utara Tahun 2013 – 2015. Renny Febrin, Universitas Riau | Mengetahui Koordinasi lintas sektor beberapa dinas terkait yang masih tidak jelas dalam penanganan pengungsi bencana erupsi Gunung Sinabung | Metode penelitian kualitatif dengan Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, | Pengkoordinasian antar instansi pun banyak hal yang menghambat penanggulangan bencana, salah satunya adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Karo. Penghambat utama bagi Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung adalah karena kurangnya koordinasi sehingga terjadi “menunggu” perintah dan koordinasi dari BPBD karena Dinas Sosial hanya sebagai pendukung |
| 5. | Pemerintah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir Di Kabupaten Kolaka Utara. Vidia Reski Awalia dan Andi Nuraeni Aksa. Universitas Muhammadiyah Makassar. | Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir | dan metode penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi | Peran pemerintah dalam menanggulangi resiko bencana banjir di Desa Tahibua Kecamatan Tiwu Kabupaten Kolaka Utara sudah baik, ini terlihat dalam peranan ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen bencana dengan baik. Penanggulangan bencana dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan. |
| 6. | Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanggulangan Banjir Rob Di Desa Alahair Kecamatan Tebing Tinggi Tahun | Mengetahui bagaimana kordinasi pemerintah dengan masyarakat dan faktor penghambat penanggulangan banjir | Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan jenis penelitian kualitatif | Kordinasi yang dilakukan pemerintah daerah tersebut mencakup, perencanaan, komunikasi, pengarah, pengendalian. Faktor penghambat penanggulangan banjir rob di Desa Alahair |

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| | 2011-2015. Penelitian yang dilakukan oleh In Nurbaiti. Universitas Riau | | | terdiri dari tidak terealisasinya perencanaan dengan baik, tingkat komunikasi yang tidak harmonis, dan minimnya anggaran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. |
| 7. | Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Bantaeng. Nasyiruddin dan Muhammad Yusuf Badjido | Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir | Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pengukuran yang cermat terhadap studi kasus fenomena sosial tertentu | Dengan menyediakan sarana dan prasarana berupa alat dan lahan untuk membangun waduk, sebagai penampung air dari Daerah Aliran Sungai (DAS) dan anak sungai ketika datang terjangan hujan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan saluran air secara profesional sehingga air dapat mengalir ke tempat yang disediakan. |
| 8. | Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana Di Kota Baubau. Disusun oleh Anwar Sadat, Universitas Muhammadiyah Buton | Mengetahui bagaimana efektifitas kinerja pemerintah dalam penanggulangan bencana pada BPBD kota baubau, | Deskriptif kualitatif, artinya suatu penelitian yang menggambarakan atau melukiskan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum | Sudah mencapai hasil yang memuaskan dalam Produktifitas Aparat, Kualitas Layanan korban bencana banjir, Responsivitas dalam kemampuan aparat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau untuk mengenali kebutuhan korban bencana |
| 9. | Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanggulangan Bencana Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh Lukman M. Fauzi, Universitas Jenderal Achmad Yani. | Menginventarisasi dan kemudian menganalisis peran yang dijalankan oleh TNI dalam penanggulangan bencana di Provinsi DIY | Metode kualitatif dengan mengkombinasikan data primer berupa wawancara, observasi lapangan | Keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik meskipun penulis merasa bahwa upaya tersebut belum dilakukan secara optimal dan komprehensif. Hal ini didasarkan tidak setiap proses penanggulangan bencana TNI berperan besar. |
| 10 | Analisis Kebijakan Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Rob (Studi Kasus Kota Tegal), oleh Soni Hazam, Drs. Edi Santoso, S.U, Drs. Wiwik Widayanti. Universitas Diponegoro | Mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat Kota Tegal dalam penanggulangan Rob. | Penelitian kuantitatif deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survai. | Dengan melibatkan segenap instansi dan elemen terkait masalah rob, yaitu dengan melibatkan SKPD, perangkat daerah, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat dan masyarakat yang terkena dampak rob |

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang terdahulu adalah penelitian ini meneliti tentang peran koordinasi antar lembaga saat terjadinya bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Bantul, serta meneliti tentang aksi tanggap darurat yang dilakukan BPBD Bantul, sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang Penanggulangan bencana Pada Tahap Mitigasi, perbedaan yang mendasar dengan penelitian sebelumnya adalah Lokasi Penelitian, Sedangkan penulis memilih lokasi untuk di teliti Di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Yogyakarta , persamaan dalam peneliti ini adalah dalam menentukan jenis metode yaitu menggunakan jenis kualitatif, dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Persamaan kedua dalam peneliti ini terletak pada jenis pokok yang dikaji, yakni menanggulangi bencana alam.

1.6. Kerangka Dasar Teori

1.6.1. Konsep Peran Badan Penanguan Bencana Daerah

1.6.1.1. Konsep Peran

Peran adalah perilaku individu yang diharapkan sesuai dengan posisi yang dimiliki. Peran yaitu suatu pola tingkah laku, kepercayaan, nilai, dan sikap yang diharapkan dapat menggambarkan perilaku yang seharusnya diperlihatkan oleh individu pemegang peran tersebut dalam situasi yang umumnya terjadi¹⁷.

¹⁷ Sarlito Wirawan Sarwono. 2012.*Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soerjono. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan¹⁸.

Pitana (2009), mengemukakan pemerintah daerah memiliki peran sebagai¹⁹:

1. **Koordinator.** Dalam penanggulangan bencana, peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai koordinator diperlukan agar upaya penanggulangan bencana dapat berjalan secara optimal. Pemerintah serta seluruh elemen masyarakat merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan sosialisasi agar terciptanya daerah tangguh bencana alam.
2. **Fasilitator.** sebagai fasilitator dalam Penanggulangan Bencana Alam, peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung dalam penanggulangan bencana alam. Adapun pada prakteknya pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat.

¹⁸ Soerjono, Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali: Jakarta, hlm 200

¹⁹ Pitana I Gde. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Hlm

3. ***Stimulator.*** Peran Badan Penanggulangan Bencana Alam sebagai stimulator adalah Pemerintah dapat mencitakan strategi untuk mengurangi resiko dampak terjadinya bencana dan pelatihan penanggulangan dengan program pembangunan serta pelatihan sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari dampak bencana alam.

1.6.1.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Kordinasi Nasional Penanggulanagan Bencana.²⁰ BPBD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana. Menurut penulis pengertian BPBD adalah merupakan lembaga pemerintah yang bergerak di bidang sosial yang mempunyai bagian-bagian struktur birokrasi dan memiliki sraf-staf ahli dalam bidang penyusunan penanganan bencana alam.

Berdasarkan paparan diatas adapat disimpulkan bahwa tingkah laku atau tindakan yang dimiliki oleh lembaga BPBD dalam melaksanakan penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi

²⁰ Peraturan Presiden No 08 Tahun 2008, *tentang badan nasional penanggulangan bencana*, pasal 1 ayat 1

maupun Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Kordinasi Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Daerah dikatakan menjalankan peran, manakala BPBD menjalankan hak dan kewajiban yang telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari status yang disandanginya.

Dari sini dapat dilihat Peran Pemerintah dan Peran Daerah dalam penanggulangan bencana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 5 “ Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan bencana” pasal 6 menyatakan Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- 1) Pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan;
- 2) Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- 3) Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standart pelayanan minimum;
- 4) Pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- 5) Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang memadai;
- 6) Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan

- 7) Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

1.6.1.3. Tugas pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain; dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat.

Adapun tugas BPBD Kabupaten Bantul mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Pemerintah Kabupaten Bantul, diantaranya yaitu:

- a) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana,

penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.

- b) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
- d) Menyusun, menetapkan, prosedur tetap penanggulangan bencana.
- e) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- f) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- g) Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- h) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsi BPBD Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi yaitu:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Menurut Kaufman, tugas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat, kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi²¹.

1.6.1.4. Struktur Organisasi Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul telah membentuk BPBD yang dituangkan dalam Peraturan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BBD Pemerintah Kabupaten Bantul. Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur pengarah, terdiri atas:
 - a) Pejabat Pemerintah Daerah Terkait; dan
 - b) Anggota Masyarakat Profesional dan Ahli.
- c. Unsur Pelaksanaan, terdiri atas :
 - a. Kepala pelaksana
 - b. Sekertaris

²¹ Kaufman & Rasyid. 2011. *Tugas dan Fungsi Pemerintah*, hlm 101

- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- d. Seksi kedaruratan dan Logistik
- e. Seksi Rehabilitas dan Rekontruksi
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

1.6.2. Konsep Bencana Alam

1.6.2.1. Definisi Bencana Alam

Sedangkan definisi bencana diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Dalam konsep Undnag-Undang No.24 tahun 2007 ini bencana dibagi dalam tiga macam bentuk bencana. Pertama, bencana alam yaitu yang disebabkan oleh faktor alam seperti gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, angin puting beliung dan banjir. Kedua, bencana yang disebabkan oleh faktor non alam seperti gagal teknologi, keracunan atau polusi zat kimia. Dan ketiga, bencana sosial yaitu bencana yang disebabkan oleh ulah tangan manusia seperti konflik sosial.

1.6.2.2. Jenis-jenis Bencana Alam

Terdapat beberapa Jenis-jenis bencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yaitu:

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
2. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit;
3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.
4. Kegagalan Teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan, manusia dalam penggunaan teknologi dan atau industri yang menyebabkan pencemaran, kerusakan bangunan, korban jiwa, dan kerusakan lainnya.

1.6.2.3. Faktor-faktor Penyebab Bencana

Terdapat tiga faktor penyebab terjadinya bencana yaitu:

1. Faktor alam (*natural disaster*) bencana ini dikarenakan fenomena alam tana ada campur tangan manusia.
2. Faktor non alam (*nonnatural disaster*) bencana ini bukan dikarenakan fenomena alam dan juga bukan akibat ulah manusia.
3. Faktor sosial/manusia (*man-made disaster*) bencana ini murni akibat perbuatan manusia, misalnya konflik horizontal, konflik vertikal dan terorisme.

Secara umum faktor penyebab terjadinya bencana adalah karena adanya interaksi antara ancaman (*hazard*) dan kerentanan (*vulnerability*). Ancaman bencana menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 adalah Suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Kerentanan terhadap dampak risiko bencana adalah Kondisi atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu (MPBI, 2004:5)

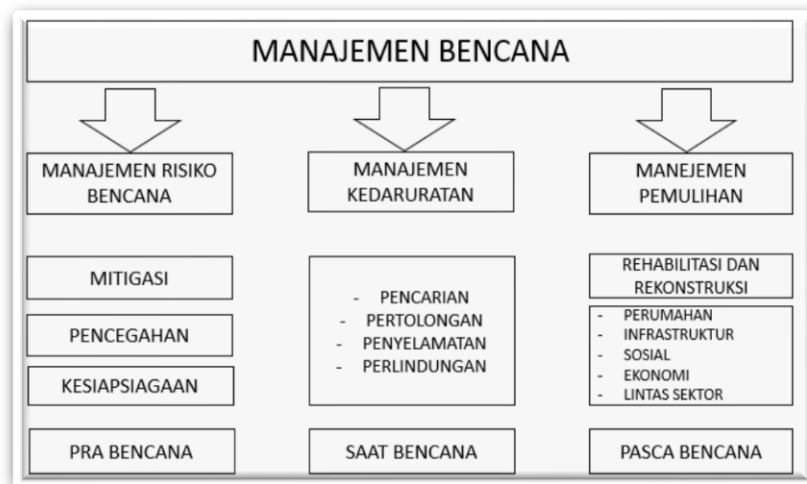
1.6.2.4. Manajemen Bencana

Menurut Nurjanah, Manajemen bencana sebagai Proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen bencana seperti *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Cara kerjanya

meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan.²²

Manajemen bencana dapat diklompokan menjadi 3 tahap dengan beberapa kegiatan meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Tabel 1.3
Manajemen Bencana.



Sumber :UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

1.6.3. Penanggulangan Bencana Alam

Dalam Peraturan Daerah No. 05 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan dalam merespon persoalan bencana di Indonesia, termasuk untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penanggulangan bencana. Kebijakan tersebut dituangkan dalam

²² Nurjanah,dkk. 2012. *Manajemen Bencana. Bandung.* ALFABETA. hlm 50.

berbagai peraturan perundang-undangan dan program penanggulangan bencana. Disetiap perundang-undangan adalah kebijaka, namun tidak setiap kebijakan diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan.²³ Dengan ini pemerintah menetapkan kebijakan yang berupa undang-undang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 05 tahun 2010, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penghitungan tingkat resiko bencana, penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 05 tahun 2010, tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

1. Pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan;
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
3. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
4. Pemulihan kondisi dari dampak bencana;

²³ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (Bandung, Alfabeta:2011) hlm 3.

5. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara yang memadai;
6. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
7. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Terkait dengan penanggulangan bencana, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 05 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan “penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitas”.

Menurut Carl Frederick, kebijakan merupakan suatu yang mengarah pada tujuan diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Sedangkan merumuskan sebagai langkah yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi²⁴.

²⁴ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, hal 3.

1.6.3.1. Tahap Penanggulangan Bencana

Menurut Ramli, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana kegiatan pencegahan bencana (pra-bencana), tanggap darurat dan rehabilitasi (pasca bencana)

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

1. Pra-bencana

Dalam pra bencana (mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini).

a. Pencegahan (*Prevention*)

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana (jika mungkin meniadakan bahaya). Misalnya: melarang pembakaran hutan dalam perladangan, melarang penambangan batu di daerah yang curam dan melarang membuang sampah sembarangan.

b. Mitigasi bencana (*Mitigation*)

Mitigasi adalah serangkaian tindakan untuk mengurangi dampak resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun pelatihan penyadaran kepada masyarakat dan peningkatan

kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi dapat dilakukan melalui a) pelaksanaan penataan ruang, b) pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur , tata bangun, dan c) penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun moderen. (UU Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 47 ayat 2 tentang Penanggulangan Bencana)²⁵.

c. Kesiapsiagaan (*Preparedness*)

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna

d. Peringatan Dini (*Early Warning*)

Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang (UU 24/2007) atau Upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi.

Tentang bencana, juga berkembang paradigma tentang tindakan/cara untuk menanggulangi bencana, yakni:

e. Paradigma Bantuan Darurat

f. Paradikma mitigasi

²⁵ Rijanta, dkk. *Modal Sosial dalam Manajemen Bencana*. 2014. UGM. Hlm. 38

- g. Paradigma pembangunan
- h. Paradigma pengurangan resiko

2. Tahap Tanggap Darurat

Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Tahapan keadaan darurat bencana meliputi Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi ke Pemulihan²⁶, sedangkan tangga darurat bertujuan untuk:

1. Membatasi korban dan kerusakan
2. Mengurangi penderitaan
3. Mengembalikan kehidupan dan sistem masyarakat
4. Mitigasi kerusakan dan kerugian
5. Sebagai pengembalian kondisi

Keberhasilan pencapaian tujuan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu informasi dan sumber daya. Informasi adalah mencari informasi sebanyak mungkin yang kita dapatkan mengenai bencana dan akibat

²⁶ Pristiyanto, Djuni. *Evaluasi Terhadap InaTEWS: Harapan Dan Kenyataan Pada Pristiwa Gempa Bumi Outer-Rise*, Compress LIPI. 2012. Jakarta. Hlm 87

yang ditimbulkan. Jika informasi tidak benar, bisa dipastikan keputusan akan salah dan intervensi yang dilakukan juga tidak tepat (tidak efektif), juga sangat dimungkinkan menghambur-hamburkan sumber daya dan sumber dana (tidak efisien). Sedangkan Sumber Daya adalah seberapa banyak sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dan sumberdaya lokal. Semakin banyak tenaga produktif dan sumber daya manusia berkualitas maka tanggap darurat bencana akan terlaksana dengan baik, cepat, dan sesuai rencana yang ditetapkan.

Langkah-langkah penyusunan Tanggap Darurat menurut Okleqs (2008)

- a. *Mitigation* (Mitigasi): kajian awal yang dilakukan untuk mengeliminasi atau menurunkan drajat resiko jangka panjang terhadap manusia atau harta benda yang diakibatkan oleh bencana.
- b. *Preparedness* (Kesiapsiagaan): kegiatan yang dilakukan lebih lanjut berdasarkan hasil mitigasi, yang mencakup pengembangan kemampuan personal, penyiapan prasarana, fasilitas dan sistem bila terjadi keadaan *emergency*.
- c. *Response* (kesigapan): kemampuan penanggulangan saat terjadi keadaan krisis/ bencana yang terancam, cepat, tepat dan selamat (termasuk tanda bahaya, evakuasi, SAR, (*search and rescue*), pemadaman kebakaran, dan lain-lain).

d. *Recovery* (pemulihan): kegiatan jangka pendek untuk pemulihan kebutuhan pokok minimum kehidupan masyarakat yang terkena bencana, dan jangka panjang mengembalikan kehidupan secara normal.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Tanggap Darurat bencana yang bertujuan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan meliputi:

- a. Penyelamatan dan evakuasi korban maupun harta benda
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar
- c. Perlindungan
- d. Pengurusan pengungsi
- e. Penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

3. Tahap Pasca Bencana

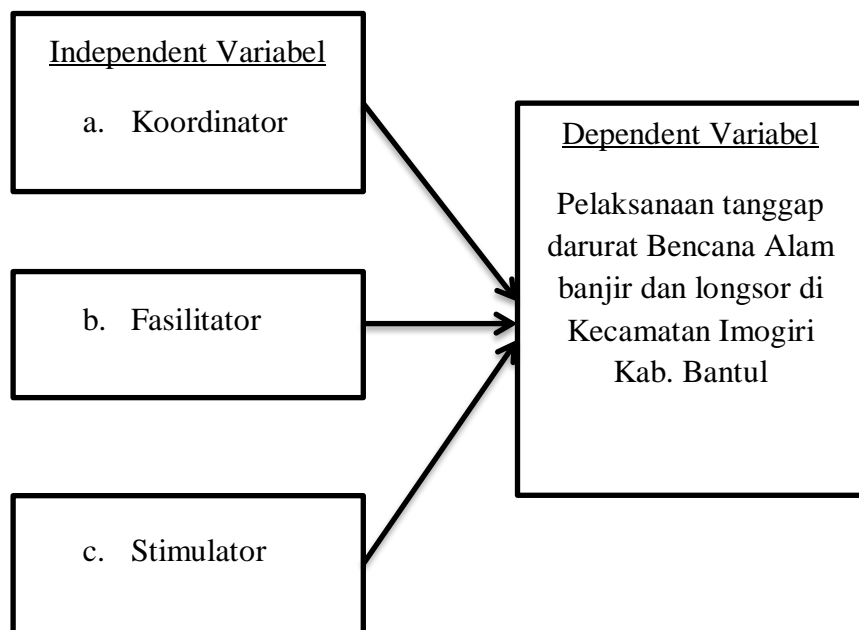
Tahap pasca bencana dalam Penanggulangan bencana meliputi dua tindakan utama yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi.

1. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau pelayanan masyarakat sampai ke tingkat yang memadai pada wilayah yang terkena bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalanya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah terkena bencana (pascabencana).

2. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Tabel .1.4.

KERANGKA TEORITIK



1.7. Definisi Konseptual

Kerangka konseptual merupakan uraian yang menjelaskan konsep-konsep apa saja yang terkandung di dalam asumsi teoritis yang akan digunakan untuk mengabstraksikan unsur-unsur yang terkandung dalam fenomena yang akan diteliti dan bagaimana hubungan antara konsep-konsep tersebut.

1. Konsep Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Peran BPBD dalam melaksanakan penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Daerah dikatakan menjalankan peran, manakala BPBD menjalankan hak dan kewajiban yang telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari status yang disandanginya.

2. Konsep Bencana Alam

Bencana diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

3. Penanggulangan Bencana Alam

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut. Sedangkan pencegahan adalah mengambil suatu tindakan yang diambil terlebih dahulu sebelum kejadian, dengan didasarkan pada data/keterangan yang bersumber dari hasil pengamatan atau penelitian epidemiologi.

1.8. Definisi Operasional

Berdasarkan kerangka berfikir maka variabel dalam menentukan langkah-langkah Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat digambarkan sebagai berikut;

1.8.1. Indikator-indikator Peran

1. Koordinator
 - a. Melaksanakan kordinasi dengan Masyarakat
 - b. Melaksanakan kordinasi dengan berbagai instansi
2. Fasilitator
 - a. Sarana dan prasarana pendukung dalam penanggulangan bencana
 - b. Mencipakan strategi dalam penangulangan bencana
3. Stimulator
 - a. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat

- b. Menciptakan strategi optimalisasi penanggulangan bencana

1.8.2. Pelaksanaa penanggulangan Tanggap Darurat Bencana

- a. Penyelamatan dan evakuasi korban maupun harta benda
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar
- c. Perlindungan
- d. Pengurusan pengungsi
- e. Penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

1.8.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan bencana tahap Tanggap Darurat

- a. Faktor Penghambat
- b. Faktor Pendukung

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka peneliti ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu berusaha mengungkapkan suatu masalah yang terjadi kemudian menganalisis informasi data yang didapat. Data tersebut dapat berupa naskah wawancara, catatan dan dokumentasi dan lainnya.²⁷ Sehingga penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari dan menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.

²⁷ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004), Hlm 11

1.9.2. Lokasi penelitian

Sesuai dengan pokok pembahasan penelitian ini mengambil studi kasus di kecamatan Imogiri, kabupaten Bantul, dimana kecamatan Imogiri menjadi titik persoalan yang akan peneliti kaji dan pengumpulan data akan diperoleh dari Kantor Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta maupun dari masyarakat Imogiri khususnya warga yang terkena dampak bencana alam banjir dan longsor.

1.9.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendapatkan informasi atau fakta-fakta dilapangan untuk mendukung suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan dua langkah sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam Observasi ini peneliti hanya sebagai pengamat yang melihat bagaimana dan apa yang terjadi dilapangan untuk mengetahui bagaimana kondisi tempat penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada reponden guna mendapatkan data dan keterangan yang mendukung dalam penelitian.

Seperti dikemukakan oleh Guba dan Lincoln yang dikutip Moleong (2000) mengatakan bahwa pengamatan memungkinkan

peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.

Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah tanya jawab dengan narasumber. Narasumber yaitu merupakan seseorang yang mengetahui informasi data yang akan kita cari, dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah Kepala BPBD Bantul serta anggota dan Masyarakat terkena banjir dan longsor.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk teknik pengumpulan data melalui dokumen dan peninggalan tertulis yang berkaitan erat dengan penelitian yang dikaji contoh foto-foto kawasan yang terena banjir maupun media masa atau koran.

1.9.4. Unit Analisis

Untuk itu peneliti dalam langkah unit analisis mampu untuk menyusun data-data yang perlu dicari agar proses wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dapat memberi manfaat atau solusi dari permasalahan yang diusung suatu penelitian. Sejalan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini, makan unit analisisnya adalah orang-orang yang terkait dalam penelitian ini.

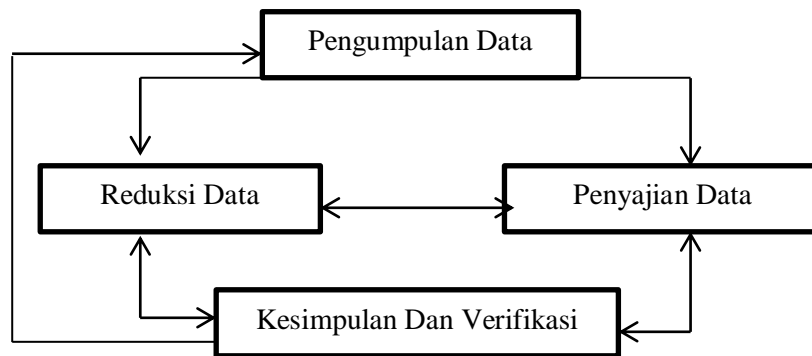
1.9.5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses memilah-milah kemudian menyusun secara sistematis sumber data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, atau sumber data lain yang mendukung penelitian guna mendapatkan informasi dan menjamin keabsahan atau validitas dari penelitian yang dibuat sehingga informasi yang akan dibagikan kepada khayalak ramai dapat dibuktikan kebenarannya dan bermanfaat bagi semua. Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Oleh karena itu penelitian kualitatif tidak menekankan generalisasi tetapi lebih pada pemaknaan. Generalisasi atau gambaran umum dalam penelitian kualitatif dinamakan *transferability*, hal ini berarti hasil dari penelitian tersebut dapat digunakan ditempat lain, manakala tempat tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda.²⁸

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992), model analisis interaktif dapat dilihat dalam gambar berikut²⁹.

²⁸ Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 123.

²⁹ Huberman, M & Miles, B.M.. Analisis data kuantitatif. Jakarta: universitas indonesia (UIPress) 1992 hlm 20.



Gambar 3. Komponen analisis data: model interaktif
 Sumber: Miles dan Huberman (1992:20)

Adapun tahap yang dilakukan adalah sebagai berikut.

3. *Data reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya yang cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Kemudian merangkum, memilah hal-hal yang pokok. Memfokuskan hal yang penting, dicari tema dan polanya, sehingga lebih sederhana dan mudah disistematikan dalam memberikan gambaran mengenai hasil penelitian.

4. *Data Display* (Penyajian Data)

Data yang telah direduksi, kemudian disajikan dengan menganalisis secara kualitatif, yaitu disajikan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi.

5. *Conclusion Drawing/verification* (menarik kesimpulan atau verifikasi)

Kesimpulan sementara yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikut. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten penelitian kembali kelapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

1.10. Sistematika Penulisan

Tujuan adanya sistematika pembahasan adalah untuk mengetahui secara rinci tentang urutan proposal.

I. Halaman Judul

II. Daftar Isi Proposal

Bab I Pendahuluan, yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

1.1. Latar Belakang masalah

1.2. Rumusan Masalah

1.3. Tujuan Penelitian

1.4. Manfaat Penelitian

1.5. Studi Terdahulu

1.6. Kerangka Dasar Teori

1.7. Definisi Konseptual

1.8. Definisi Operasional

1.9. Metode Penelitian

1.10. Sistematika Penulisan

Bab II Deskripsi Obyek Penelitian yang terdiri beberapa bagian:

2.1. Profil Kabupaten Bantul

2.2. Deskripsi Kecamatan Imogiri Kabupaten bantul

2.3. Deskripsi Sejarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Bab III Pembahasan yang terdiri dari beberapa bagian:

3.1. Bagaimana Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPBD dalam menanggulangi Tanggap Darurat bencana
banjir dan Longsor di Kecamatan Imogiri Kabupaten
Bantul.

3.2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi peran BPBD dalam
menanggulangi bencana alam banjir dan longsor di
Kecamatan Imogiri.

Bab IV Penutup terdiri dari beberapa bagian:

4.1. Kesimpulan

4.2. Saran

Daftar Pustaka